



KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN

# POLICY BRIEF

Edisi 11 Th. 2020



KESETARAAN GENDER UNTUK INDONESIA MAJU  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





Foto: Operasi Penyidikan di Perusahaan

# Komitmen Pimpinan Mengawal Pondasi Keadilan dan Kesetaraan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan perlunya melakukan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Meskipun PUG telah diinstruksikan sejak tahun 2000 namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan PUG adalah adanya komitmen dan keseriusan dari pimpinan lembaga. *Policy brief* ini menggambarkan tingginya komitmen pimpinan pada Ditjen GAKKUM dalam pelaksanaan PUG sehingga mendapatkan penghargaan juara tingkat utama lomba PUG antar Unit Kerja Eselon I KLHK.

## Mengapa Perlu

# KOMITMEN PIMPINAN

## Untuk Melaksanakan PUG ?

Pelaksanaan pengarusutamaan gender memerlukan prasyarat adanya kondisi awal yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat awal agar pelaksanaan PUG dapat dijalankan oleh suatu instansi, yaitu:

- 1** Komitmen politik dan kepemimpinan lembaga untuk melaksanakan PUG, yang ditunjukkan dengan adanya peraturan perundangan-undangan.
- 2** Kebijakan dan program merupakan wujud komitmen yang ditunjukkan dengan adanya kebijakan operasional atau teknis.
- 3** Kelembagaan PUG yaitu adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi PUG yang ditunjukkan dengan adanya Pokja (Kelompok Kerja), *Focal Point*, *Gender Champion* dan Fasilitator.
- 4** Sumber daya (SDM, dana, dan sarana prasarana).
- 5** Data terpilah yang ditunjukkan dengan adanya statistik dan data terpilah menurut jenis kelamin.
- 6** Alat analisis (Panduan, Modul dan Bahan KIE).
- 7** Jejaring atau partisipasi masyarakat.

### Dalam prakteknya,

Pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat PUG ini menjadi persoalan dan tantangan yang dirasakan oleh hampir semua instansi baik pusat maupun daerah. Dari hasil identifikasi bahwa salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya komitmen pemimpin lembaga.

Dari ke-7 prasyarat PUG yang menjadi daya ungkit agar menimbulkan pengaruh paling besar ke prasyarat lainnya yang perlu diintervensi terlebih dahulu adalah komitmen pimpinan. Jika prasyarat ini terpenuhi akan berdampak pada terpenuhinya prasyarat yang lainnya seperti adanya kebijakan, kelembagaan PUG yang kuat dan lain sebagainya.

### Dapat disimpulkan,

Bahwa dari ketujuh prasyarat PUG, komitmen diposisikan di urutan pertama, ini artinya komitmen politik dan keseriusan kepemimpinan lembaga menjadi landasan atau pondasi bagi terpenuhinya prasyarat PUG lainnya.

Mengapa demikian? Karena PUG sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui integrasi gender ke dalam keseluruhan tahapan kebijakan perlu ditindaklanjuti dengan mekanisme penganggaran yang responsif gender. Hal ini tidak mungkin bisa direalisasikan tanpa campur tangan otoritas pimpinan lembaga.



Foto: Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) perempuan sedang menunjukkan kebolehannya dalam menggunakan senapan.

## Komitmen Pimpinan dalam Pelaksanaan PUG di Ditjen Gakkum

Komitmen Kementerian/Lembaga dituangkan dalam bentuk payung hukum untuk melaksanakan PUG di institusi masing-masing seperti Surat Keputusan, Instruksi, Surat Perintah, Surat Edaran, dan lain-lain. Bentuk komitmen pimpinan dapat dituangkan dalam Rencana Strategis atau Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk tingkat Kementerian dan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I untuk tingkat unit Eselon I.



### Bertugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

### Berperan:

Sebagai unit kerja pendukung yang cenderung bersifat responsif dalam membangun dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan di seluruh wilayah Indonesia. Menjadi gerbang terakhir dalam satuan kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal GAKKUM Lingkungan Hidup dan Kehutanan senantiasa mendukung melalui penegakan hukum secara tegas dan konsisten dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan demi tercapainya Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong.

PUG di Ditjen Gakkum dilaksanakan berdasarkan payung hukum pelaksanaan PUG yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P2/PHLHK/set/set.1/5/2020 tentang *Roadmap* PUG pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

## UNTUK MEMBANTU PERCEPATAN IMPLEMENTASI PUG JUGA DISUSUN DOKUMEN PENDUKUNGNYA



Rencana Aksi PUG



Pedoman Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Data Terpilah Gender



Foto: Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pengambil keputusan dalam jajaran Ditjen GAKKUM telah menerapkan pengarusutamaan gender dalam tugas utama dan fungsi setiap unit. Komitmen ini diatur dalam semua peraturan dan ketentuan internal, serta pembentukan unit kerja pengarusutamaan gender. Panduan dan bimbingan untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender didukung dengan menggunakan standar alat pengarusutamaan gender seperti penganggaran berbasis gender dan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

## **Adanya Komitmen Politik dan Keseriusan Pimpinan**

### **Dalam Meletakkan Landasan Kebijakan PUG Berimplikasi Pada Pemenuhan Prasyarat PUG Lainnya**

**1.**

#### **Kelembagaan PUG**

Dalam lingkup Ditjen GAKKUM telah dibentuk kelembagaan PUG berupa Sub Pokja PUG sesuai Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.10/PHLHK/SET/SET.1/6/2020 tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. Sesuai dengan tugas yang telah termaktub dalam SK Dirjen GAKKUM, Sub-POKJA PUG merancang rencana aksi untuk melaksanakan agenda PUG di lingkup Ditjen GAKKUM.



*Roadmap PUG*

Salah satu dokumen yang menjadi kerangka rencana aksi tersebut. Kinerja Sub Pokja Ditjen GAKKUM setiap tahun dituangkan dalam bentuk Laporan Sub Kelompok Kerja PUG. Dalam laporan ini disampaikan pelaksanaan PUG di lingkup Ditjen GAKKUM dan permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta rencana perbaikan di tahun berikutnya.

**2.**

#### **Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender**

Sejak terbentuk, Sub Pokja PUG telah menyatakan bahwa PUG di lingkup Ditjen GAKKUM merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan kerja; perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi pada setiap kebijakan dan program kerja. Pada tahap perencanaan dan penganggaran, seluruh bentuk program kerja dan kebijakan memperhatikan empat aspek utama, yaitu kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam sistem kerja Ditjen GAKKUM serta membantu memastikan keluaran kebijakan dan kegiatan yang dilakukan tidak netral gender.

### 3.

## Fasilitas Berperspektif Gender

Untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki sesuai pedoman keselamatan dan kenyamanan kerja yang responsif gender, Ditjen GAKKUM telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan praktis gender bagi para stafnya, seperti:



Sumber : Paparan Lomba PUG GAKKUM LHK, 2020

Penyediaan Ruang Laktasi untuk memfasilitasi lingkungan kerja yang nyaman baik untuk staf perempuan maupun laki-laki. Melalui penyediaan ruang laktasi, Ditjen GAKKUM mengakomodasi hak reproduksi perempuan serta kebutuhan spesifik pekerja perempuan pasca melahirkan dan masa menyusui.



Sumber : Paparan Lomba PUG GAKKUM LHK, 2020

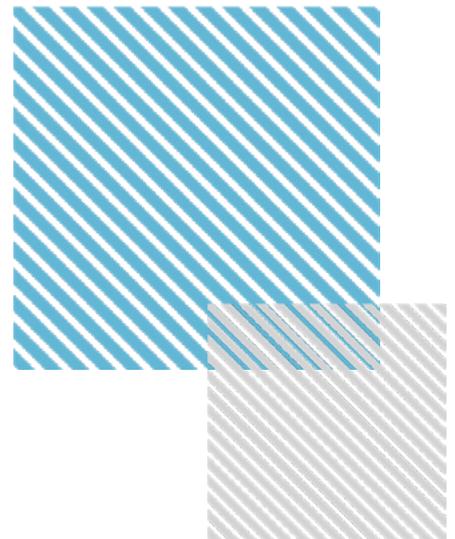
Renovasi Toilet Utama: Adanya perbedaan anatomi laki-laki dan perempuan, serta guna pemenuhan faktor keamanan dan kenyamanan bagi staf perempuan dan laki-laki di tempat kerja, maka Bagian Keuangan dan Umum - Sekretariat Direktorat Jenderal Ditjen GAKKUM, merenovasi toilet utama dengan memisahkan antara fasilitas toilet laki-laki dan perempuan.

## SARPRAS (ALAT PELINDUNG DIRI) GAKKUM PUSAT



Sumber : Paparan Lomba PUG GAKKUM LHK, 2020

Penyediaan perlengkapan sarana dan prasarana untuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang responsif gender dimaksudkan untuk menunjang pencapaian kinerja PPLH, serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) staf perempuan dan laki-laki. Upaya pemenuhan perlengkapan kerja yang ergonomis, sebagai alat kerja pendukung tugas pokok dan fungsi Ditjen GAKKUM, terutama investigator perempuan dan laki-laki dituangkan dalam "Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Penyidik Lingkungan Hidup dan Kehutanan" (2019). Analisis gender dilakukan dalam membuat kebijakan terkait perlengkapan kerja. Pada tugas-tugas pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dengan mengacu pada adanya perbedaan risiko paparan limbah B3 pada perempuan dan laki-laki, perlengkapan kerja disesuaikan mengacu kebutuhan praktis gender.



## 5.

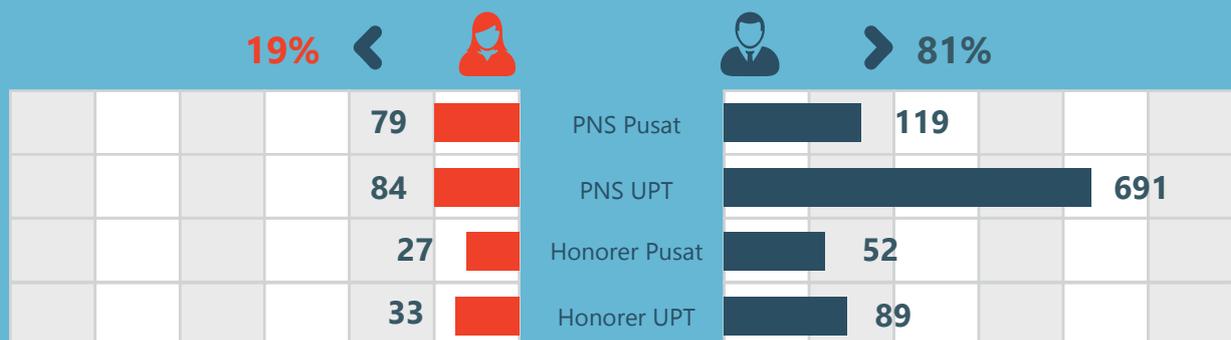
### Data Terpilah

Ketersediaan data terpilah merupakan sasaran utama PUG dalam lingkungan Ditjen GAKKUM. Data terpilah tidak terbatas pada pemilahan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, tetapi juga usia, pendidikan, dan sebagainya. Adanya data terpilah dapat mendukung alokasi anggaran yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Ketersediaan *baseline* data terpilah menjadi pondasi kuat PUG dalam bentuk kebijakan dan program yang responsif gender. Proses ini dimulai dengan menyediakan data terpilah kuantitatif yang biasa dikumpulkan oleh Ditjen GAKKUM, lalu dipilah menurut jenis kelamin. Dari data kuantitatif ini, kemudian ditelaah isu gender di dalamnya dengan melakukan analisis gender. Proses ini akan menghasilkan data kualitatif yang bisa menjadi dokumen penunjang dalam mengintegrasikan *Gender Budget Statement*. Dengan proses yang terintegrasi dengan siklus perencanaan dan penganggaran maka akan menghasilkan monitoring dan evaluasi responsif gender.

#### Pada tahun 2017,

Ditjen GAKKUM telah memiliki data terpilah yang lengkap meliputi jumlah pegawai, jumlah sebaran pegawai, jumlah jabatan fungsional polisi kehutanan, jumlah jabatan fungsional PPLH, jumlah jabatan fungsional penyidik pegawai negeri sipil, dalam kategori jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Data tersebut diperbarui terus-menerus sesuai dengan perkembangan sumber daya manusia di Ditjen GAKKUM.

### SDM Ditjen Gakkum



- PNS UPT
- Honorer Pusat
- Honorer UPT
- PNS Pusat



Sumber : Paparan Lomba PUG GAKKUM LHK, 2020

## 6.

### Jejaring atau Partisipasi Masyarakat



Foto : Fasilitasi Resolusi Konflik Masyarakat dan Perusahaan

Dalam menjalankan penegakan hukum di lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen GAKKUM banyak menjalin jejaring dan partisipasi masyarakat melalui peran, antara lain: memfasilitasi resolusi konflik antara masyarakat dengan perusahaan untuk mendapatkan haknya; menerima pengaduan dari masyarakat dari berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat baik laki-laki maupun perempuan; dan sosialisasi penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Pengakuan dan penghargaan terhadap komitmen politik dan kepemimpinan Dirjen GAKKUM dalam mengimplementasikan PUG dibuktikan dengan keberhasilan Ditjen GAKKUM mendapatkan penghargaan utama dalam Lomba Pengarusutamaan Gender (PUG) antar Eselon I lingkup KLHK. Eselon I yang memperoleh penghargaan pada lomba PUG ini dipastikan telah memenuhi kriteria utama PUG yaitu pemahaman tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, keadilan dan kesetaraan gender, anggaran responsif gender dan PPRG, data terpilah menurut jenis kelamin, ketersediaan data terpilah dan pengelolaannya (*database*), serta *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*, dan juga komitmen kebijakan, implementasi PUG di tingkat unit Eselon I KLHK, serta ketersediaan sarana prasarana responsif gender.

Ditjen GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terpilih sebagai penerima *Asia Environmental Enforcement Awards* tahun 2019 yang diselenggarakan oleh *the United Nations Environment Programme* (UNEP), bekerja sama dengan *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), *the United Nations Development Programme* (UNDP), INTERPOL dan *the Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species*, serta dengan dukungan Pemerintah Norwegia. *Asia Environmental Enforcement Awards* bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas. Dari 6 (enam) kategori penilaian, yakni kolaborasi, dampak, inovasi, integritas, kepemimpinan gender serta kerja sama Asvvia-Afrika, GAKKUM KLHK berhasil meraih 3 (tiga) kategori penghargaan, yakni dalam kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. Hal ini menjadikan Gakkum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam ajang ini.



Foto: Lounge yang disediakan untuk memberi kenyamanan pegawai dalam bekerja.

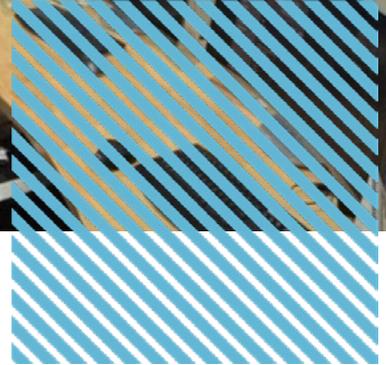
## Rekomendasi

Komitmen pimpinan menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan PUG. Hal ini ditunjukkan oleh Ditjen GAKKUM melalui penetapan payung hukum dan dokumen pendukung PUG yang lengkap sehingga bisa menjadi dasar acuan pelaksanaan komponen atau prasyarat PUG lainnya. Untuk optimalisasi PUG di Ditjen GAKKUM, peningkatan komitmen pimpinan perlu diperluas dari lingkup regulasi dan dokumen penunjang ke pelembagaan komitmen organisasi Ditjen GAKKUM untuk mempromosikan kesetaraan gender melalui:

- 1.** Meningkatkan kapasitas kelembagaan Ditjen GAKKUM dalam menjamin pemenuhan *practical gender concerns*, membuat kebijakan yang sensitif gender, serta dapat mengakomodasi mekanisme pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang mungkin dialami oleh staf di tempat kerja.
- 2.** Peningkatan pelembagaan komitmen organisasi Ditjen GAKKUM dengan melakukan kaderisasi Sub Pokja PUG dan peningkatan pelaksanaan aktivitas, program, kegiatan, serta pendanaan untuk mendukung implementasi PUG.
- 3.** Pembuatan modul-modul pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dapat mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dan akan sangat membantu akuntabilitas gender dari hasil program dan kebijakan kerja Ditjen GAKKUM.
- 4.** Komitmen pimpinan untuk percepatan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender hingga Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen GAKKUM.



Foto: Intelegence Center yang dimiliki Ditjen GAKKUM juga sering dijadikan media belajar anak-anak.



## Referensi

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Untuk Kementerian/ Lembaga*. Jakarta: KPPPA.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *Pengarusutamaan Gender: Semua Dimulai dari Komitmen*. KPPPA. Diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1748/pengarusutamaan-gender-semua-dimulai-dari-komitmen>.
3. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan*. Kemenkeu. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/profil/pengarusutamaan-gender/>.
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. (2020). *Deskripsi Organisasi Ditjen GAKKUM*. GAKKUM. Diakses dari: <http://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/profil>.
5. Ditjen GAKKUM & UNDP. (2020). *Jalan Menuju Kesetaraan: Roadmap Pengarusutamaan Gender 2020-2024*. Jakarta: Ditjen GAKKUM.
6. Ditjen GAKKUM. (2020). *Pengarusutamaan Gender Ditjen Penegakan Hukum. Paparan Lomba Pengarusutamaan Gender Lingkup Eselon I KLHK*.
7. Ditjen GAKKUM. (2019). *Gakkum KLHK Terima Penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards Tahun 2019*. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi. Diakses dari: <http://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2019/11/14/ditjen-penegakan-hukum-klhk-terbaik-se-asia-pasific/>





Pokja Pengarusutamaan Gender  
Biro Perencanaan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
2020



@gender\_klhk



@gender.klhk



Pengarusutamaan Gender KLHK